

BAB II

INDUSTRI FILM DALAM CENGKRAMAN KAPITALISME

2.1 Industrialisasi Perfilman di Indonesia

Perkembangan industri film di Indonesia pada awalnya sangat terkait dengan perkembangan bioskop. Menurut Garin Nugroho dan Dyna Herlina, perkembangan film di Indonesia dibagi menjadi enam periode. Pertama, periode 1900-1930 disebut sebagai era seni di kalangan perkotaan. Kedua, periode 1930-1950 merupakan masa film tumbuh sebagai hiburan dalam suasana depresi ekonomi global. Ketiga, periode 1950-1970 dikenal sebagai waktu ketegangan ideologi. Keempat, periode 1970-1985 ditandai dengan globalisme semu. Kelima, periode 1985-1998 disebut periode krisis di tengah globalisasi. Keenam, periode 1998-2013 ditandai dengan gejolak demokrasi (Garin Nugroho dan Herlina, 2015:4-6).

Salah satu poin penting dalam sejarah adalah peran Nippon Eigasha yang mampu memproduksi delapan film setiap tahunnya (Garin Nugroho, 2015:67). Tabel perkembangan sejarah film Indonesia juga menunjukkan bahwa industri film Indonesia mengalami kesulitan pada tahun 1950-an akibat invasi film impor. Pada tahun 1953, pasar film nasional ditekan oleh film-film impor. Para seniman bahkan melakukan protes di Istana Merdeka untuk meminta pemerintah mengubah peraturan perdagangan film impor dan memberi perhatian pada pemutaran film Indonesia. Antara tahun 1950 hingga 1956, produksi film Indonesia menurun drastis menjadi 36 film karena dominasi film impor. Film Malaysia dan India menjadi kompetitor utama film Indonesia di bioskop kelas dua, sementara film Amerika mendominasi bioskop kelas atas (H.M. Johan Tjasmadi, 2008:56).

Industri perfilman di Indonesia mengalami fluktuasi dalam produksinya. Pada periode 1992-1993, tercatat 42 film diproduksi. Namun, produksi film Indonesia mencapai titik terendahnya pada tahun 2001-2002 dengan hanya

menghasilkan 4 film. Tabel produksi film Indonesia dalam rentang tahun 1992-2012 memberikan ikhtisar tentang bagaimana perkembangan produksi film di negara ini.

Gambar 1 Produksi Film Indonesia Dari Kurun Waktu 1992- 2012



Sumber: Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam *Indonesia's Movie Industry: Impediments to Growth*

Selama periode reformasi, produksi film di Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan. Namun, bila kita telaah dengan teliti, pertumbuhan industri perfilman Indonesia sebagian besar dipicu oleh semangat dan usaha keras para pelaku perfilman tanah air. Sementara itu, kebijakan perfilman di Indonesia masih kurang dalam memberikan dorongan yang kuat untuk kemajuan industri film Indonesia.

2.2 Kemunculan dan Perkembangan Kapitalisme

Munculnya kapitalisme disebabkan oleh faktor budaya dan struktural. Max Weber mengemukakan bahwa nilai-nilai Protestan mendorong kapitalisme. Ini terjadi karena ajaran Protestan mendorong kerja keras dan mengabaikan dunia spiritual. Selain itu, faktor struktural, seperti perubahan dari masyarakat feodal ke kapitalis, juga memainkan peran penting dalam perkembangan kapitalisme. Proses ini termasuk pemisahan produsen kecil dari hasil produksi, pertumbuhan kota, transformasi petani menjadi buruh, munculnya kelas proletariat perkotaan,

dan ekspansi perdagangan laut yang mempercepat pertumbuhan modal (Arif Purnomo, 2007:35).

Menurut Anthony Giddens yang dikutip Purnomo (2007), faktor terpenting bagi pertumbuhan modal dalam perubahan struktural cara produksi di masyarakat adalah faktor akumulasi. Akumulasi ini mewakili produksi kapitalis yang tercipta sebagai hasil kemajuan teknologi dan persaingan antar kapitalis individu, karena peristiwa ini merangsang tabungan dan investasi. Perkembangan kapitalisme tidak lepas dari pandangan tokoh-tokoh seperti Adam Smith, Keynes, Restow dan lain-lain. Adam Smith yang dikenal sebagai bapak pemikiran kapitalis mengemukakan teori kekayaan bangsa, yang menyatakan bahwa kemakmuran suatu bangsa dapat dicapai melalui perekonomian yang bebas dan kompetitif, yaitu perekonomian tanpa campur tangan pemerintah. Menurut Adam Smith, kapitalisme adalah ideologi yang memungkinkan masyarakat bebas beroperasi dalam perekonomian dan mencari keuntungan tanpa tekanan agama dan negara. Prinsip yang berlaku saat itu adalah prinsip non-intervensi, atau lebih tepatnya prinsip non-intervensi kekuatan eksternal dalam urusan perekonomian. Menurut Smith, jika masyarakat bisa leluasa mengejar keuntungan, maka akan terjadi persaingan, dan berkat persaingan tersebut maka stabilitas masyarakat akan tetap terjaga (seolah-olah ada tangan tak kasat mata yang mengatur masyarakat di luar sepengetahuan para pelaku ekonomi) (Donnie Jal -Wudian, 2005:70).

Selanjutnya ideologi kapitalisme dimodernisasi dan dikembangkan oleh Keynes dengan teorinya tentang “intervensi negara dalam perekonomian”, khususnya dalam penciptaan lapangan kerja dan dalam penetapan suku bunga, tabungan dan investasi. Selanjutnya, W. W. Rostow mengemukakan teorinya tentang rencana lima langkah, Harrod Domar - teori tabungan dan investasi, Mazeland - teori kebutuhan untuk mencapai hasil, Reagan dan Usher - teori neoliberalisme, atau globalisasi pasar bebas, atau teori globalisasi pasar bebas (Arif Purnomo, 2007:28).

Dalam perkembangan selanjutnya, kapitalisme, khususnya kapitalisme

industri, menurut Dillard terbagi menjadi beberapa tahapan, yaitu periode kapitalisme awal (1500–1750), kapitalisme klasik (1750–1914) dan kapitalisme maju. Namun kapitalisme industri didahului oleh apa yang disebut kapitalisme primitif. Kapitalisme kuno merupakan tahap awal terbentuknya kapitalisme, yang bermula dari dasar pemikiran masyarakat feodal yang berkembang di Babilonia, Mesir, Yunani, dan Kekaisaran Romawi. Para sosiolog menyebut tahap kapitalisme ini sebagai kapitalisme pekerjaan.

Kapitalisme pedagang mengembangkan dan menuntut sistem keuangan yang menjamin pertukaran keuangan melalui pedagang, pemilik tanah, dan pendeta. Max Weber berpendapat bahwa kapitalisme berakar pada Codex Luris Roma, sebuah kode ekonomi yang digunakan oleh para pedagang di Eropa, Asia Barat, Asia Timur dan Afrika Utara. Aturan ekonomi ini sebenarnya menciptakan sistem perlindungan feodal. Dengan demikian, aturan ini memunculkan istilah “borjuasi”, yang mengelompokkan sistem feodal, disempurnakan dengan sistem hukum ekonomi. Borjuasi adalah istilah untuk kelas pemilik tanah, bangsawan dan pendeta yang tinggal di biara-biara yang semakin besar. Perkembangan selanjutnya adalah berkembangnya kapitalisme dengan menggunakan metodologi dan “kode moral” yang digunakan oleh merkantilisme, yaitu para pedagang berkumpul di pelabuhan Genoa, Venesia dan Pisa. Hal ini menyebabkan berkembangnya pasar kompetitif, keuangan, barter dan praktik perdagangan yang diadopsi oleh para pedagang abad pertengahan. Sejak referensi ini muncul, pembahasan tentang keuntungan dan keuntungan menjadi bagian integral dari kapitalisme hingga Abad Pertengahan.

Kapitalisme industri muncul setelah kapitalisme kuno. Kapitalisme industri dimulai ketika visi merkantilisme berkembang, dan perkembangan pasar dan sistem keuangan berarti bahwa perekonomian feodal hanya dimonopoli oleh pemilik tanah, bangsawan, dan pendeta. Perekonomian mulai bergerak dan memberikan pengaruh penting, menjadi bagian dari perjuangan kelas menengah. Apalagi rasionalisme filosofis zaman baru, dimulai dari Renaisans dan humanisme, mulai merambah ke bidang ekonomi. Tokoh-tokoh yang mempengaruhi kapitalisme, terutama

pandangan Thomas Hobbes tentang egoisme moral, yang pada hakikatnya adalah doktrin bahwa setiap orang secara alamiah akan berusaha untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. John Locke menekankan sisi liberalisme moral dimana salah satu ungkapannya menyatakan bahwa masyarakat harus menghormati hak milik masing-masing.

Adam Smith dan David Ricardo meninggalkan gagasan kedua tokoh tersebut di atas dengan filosofi pasar dan prinsip ekonomi *laissez-faire*. Teori ini menyatakan bahwa sistem pasarbebas dijalankan oleh sistem kepentingan ekonomi yang bebas tanpa campur tangan pemerintah. Kapitalisme semakin pesat dengan munculnya revolusi yang luas dimana sistem modern akan mendorong berkembangnya kolonialisme dan imperialisme ekonomi. Pada masa awal kapitalisme industri (1500-1750), basis kapitalisme ini adalah industri tekstil yang ada di Inggris pada abad 16-18. Pertumbuhan industri di Inggris pada abad ke-16 dan ke-18 didorong oleh adanya surplus sosial yang dapat dimanfaatkan secara produktif sehingga memungkinkan kapitalisme mendominasi seluruh sistem perekonomian sebelumnya. Surplusnya digunakan untuk berbagai usaha seperti pelayaran, pergudangan, bahan baku, barang jadi, dan berbagai jenis aset lainnya. Dengan demikian, surplus sosial ini diterjemahkan menjadi pertumbuhan produktivitas (Arif Pournomo, 2007:37).

Pada tahap kedua (1750-1914), perkembangan kapitalis berpindah dari perdagangan ke industri. Selama periode ini, modal terus terakumulasi selama tiga abad. Pesatnya perkembangan teknologi membuat proses keuangan menjadi lebih mudah. Mesin produksi massal digunakan untuk mempercepat produksi barang di berbagai industri sehingga mempercepat pertumbuhan kapitalisme. Perdagangan bebas kemudian menjadi faktor penting dalam kegiatan ekonomi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tahap ketiga ditandai dengan momentum Perang Dunia Pertama sebagai titik balik perkembangan sistem kapitalis. Tahap ini ditandai dengan beralihnya dominasi kapitalis dari Eropa ke Amerika dan perlawanan

negara-negara Asia dan Afrika terhadap kolonialisme Eropa.

2.3 Ideologi Kapitalisme dalam Perfilman Indonesia

Kapitalisme adalah sistem ekonomi yang memungkinkan individu atau perusahaan bisnis (bukan pemerintah, individu atau negara) untuk memiliki dan mengendalikan sumber daya nasional atau sumber daya modal. Menurut teori ini, individu atau perusahaan bebas bersaing untuk memaksimalkan keuntungan, misalnya melalui harga, promosi, dll. Industri media adalah milik swasta dan industri media bebas bersaing untuk mendapatkan keuntungan maksimal (Usman Ks, 2009: 22). Tidak hanya aspek ekonomi, tetapi juga faktor-faktor seperti sejarah, sosial, budaya, dan politik memiliki pengaruh terhadap perkembangan industri film di Indonesia. Sifat industri film di negara ini pada masa kini mencerminkan penerapan prinsip kapitalisme dalam struktur ekonomi politik era Orde Baru, di mana campur tangan negara atau pemerintah berperan signifikan dalam mengarahkan evolusi industri film. Diungkapkan oleh Sen (1994) bahwa pemerintah Orde Baru mewarisi dasar pembangunan media yang dikendalikan sangat ketat di bawah pengawasan Menteri Penerangan. Sebelum tahun 1964, tanggung jawab perfilman nasional dibagi ke dalam empat departemen : Pendidikan & Kebudayaan, Penerangan, Perdagangan, dan Industri. Melalui instruksi Presiden tahun 1964, Menteri Penerangan bertanggung jawab atas semua aspek perfilman di Indonesia, sedangkan aktivitas kebudayaan dan seni lain, seperti teater dan sastra, tetap menjadi tanggung jawab Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Pada tahun 1978 Departemen Penerangan ditempatkan di bawah tanggung jawab Menteri Koordinator Politik dan Keamanan (Menko Polkam) sementara Departemen Pendidikan & Kebudayaan di bawah Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra). Dengan cara ini, pemerintah terlihat lebih fokus pada memanfaatkan film sebagai sarana propaganda daripada sebagai media ekspresi seni.

Kelompok 21 menguasai industri film Indonesia. Kelompok ini

sebelumnya dipimpin oleh Sudvikatmono, adik sepupu mantan Presiden Soeharto dan Benny Suherman (Subentra Group) (Majalah Tempo, 2011). Kedekatan Sudvikatmono dengan para petinggi negara dan kepemilikan dana yang signifikan patut diakui sebagai aturan yang mengendalikan kisruh distribusi film nasional. Menurut J. B. Wahyudi, sejarah impor film pada masa Orde Baru adalah sejarah pungli, perizinan, dan pungutan liar. Semua menteri penerangan terus mencari cara untuk mengambil keuntungan dari apa yang disebut importir film atas nama "pembangunan filmnasional". Tanpa disadari, perawatan ini meningkatkan kekuatan betisnya. Untuk memudahkan "kompetisi", PT diberi monopoli impor. Perusahaan rintisan Kingdom, Suptan Film, yang sekarang dikenal sebagai Grupo 21, sebenarnya "memonopoli" distribusi film dengan jaringan bioskop yang tak tertandingi, tetapi "memiliki" tiga perusahaan impor film. Camila Internusa Films, Satria Perkasa Aesthetic Films, dan Amero Mitra Films kembali "memonopoli" impor film.

Jamahan kapitalisme itu tak menghiraukan kerinduan para penonton di kelas pinggiran yang dulu leluasa menikmati film nasional, film Mandarin, atau film India. Segmentasi khlayak yang dibentuk adalah dengan social economy status (SES) mapan, pendidikan menengah ke atas, bermukim di kota-kota besar, dan gaya hidup yang cenderung hedonisme atau bisa dijadikan budak-budak kapitalisme. Segmen khalayak ini akan merasa resah dan merasa kehilangan pegangan ketika tidak bisa menikmati film-film Hollywood baru. Terlebih lagi yang saat itu menjadi perbincangan di media online atau media pergaulan.

2.4 Kapitalisme dalam film Si Doel The Movie 2

Gejolak kapitalisme telah memberikan dampak untung dan rugi pada industri film. Film bukan saja tidak dimaksudkan untuk mendidik, mendorong kebajikan, dan memperkuat karakter anak-anak bangsa, namun hanya sekedar hiburan dan seringkali menjadi sarana untuk menyesatkan bahkan melegitimasi liberalisasi. Sinematografi yang tidak hanya dangkal, tapi juga destruktif, namun menghasilkan

keuntungan besar, tidak menjadi masalah.

Dalam diskusi mengenai industri kreatif Indonesia di London Book Fair yang berlangsung dari 12 hingga 14 Maret 2019, Ricky Pesic, Wakil Kepala Bidang Ekonomi Kreatif, mengakui bahwa Indonesia memiliki potensi besar sebagai pasar bagi industri film. Ricky menyebutkan bahwa pertumbuhan jumlah penonton bioskop di Indonesia telah mencapai 230% dalam lima tahun. Jumlah layar di studio juga mengalami peningkatan signifikan dari 800 menjadi 1800 dalam 3 tahun. Lebih lanjut, Indonesia dikenal sebagai pasar film yang sangat sukses di dunia, dengan nilai pasar mencapai US\$345 juta atau sekitar Rp 4,8 triliun (Sahana, 2019).

Dengan mempromosikan filmnya secara luas di Belanda maupun di Jakarta, Film 2 karya C Doel efektif memasuki pusran industri film kapitalis. Jika film ini tidak lepas dari kepentingan korporasi, maka sederhana dan bahkan tidak sederhana. Karnos Film memproduksi "Sea Doel: The Movie 2" bekerja sama dengan Falcon Pictures. Pada Minggu, 12 Agustus 2018, penjualan tiket mencapai 268.000 selama tiga hari tayang. Menurut Katalog Film Indonesia, dengan satu tiket setara Rp 37.000, Si Doel meraup kurang lebih Rp 9,9 juta (dari 10 hingga 12 Agustus 2018, yang kedua akhir pekan setelah pemutaran perdana film). Keuntungan industri film memang sangat menarik, total pendapatan kotor bioskop selama 11 hari sebesar Rp50,61 miliar dengan jumlah tiket terjual sebanyak 1,368 juta (Wirastama, 2018).

Jika benar demikian, maka film dipasarkan untuk menjangkau target penontonnya. Jadi, selama masih ada janji dari penggemar dan keuntungan, film dibuat dengan judul dan trailer yang "marketable" tanpa mempertimbangkan positif dan negatif konten atau masyarakat. Selain itu, negara melalui kebijakannya juga memberikan peluang sebesar-besarnya bagi pembiayaan penuh bahkan kepada investor asing guna meningkatkan nilai jual produksi film dalam negeri. Ini sebenarnya menjadi bahan perdebatan karena sebuah film yang kesungguhannya mendidik dan menginspirasi masyarakat dan massa bisa tersesat dalam keinginan menghasilkan banyak uang. Industri film yang seharusnya menguntungkan, ternyata

justro mengancam nyawa, terutama bagi generasi muda. Meskipun film dianggap sebagai alat untuk menciptakan empati terhadap seluruh alam di bawah kendali sistem kapitalis sekuler, film hanyalah alat untuk memaksimalkan keuntungan.

2.5 Sejarah Perjuangan Feminisme di Indonesia

Peristiwa terkini menunjukkan bahwa perempuan Indonesia berperan aktif di berbagai bidang seperti pemerintahan, bisnis, organisasi masyarakat, politik, pendidikan, seni dan budaya, olahraga, komunikasi, dan lain-lain (Susanto, 1997:3). Perkembangan ini menunjukkan bahwa perempuan telah diberdayakan berdasarkan kemampuannya dalam menjalankan perannya sebagai ibu rumah tangga, pekerja, dan anggota masyarakat. Kajian ini berbasis analisis gender dengan merancang struktur berdasarkan pendekatan struktural-fungsional. Sebagaimana dikemukakan Sajogjo (1992:24), teori yang membantu mempelajari peran perempuan adalah teori struktur-aktivitas yang didukung oleh analisis gender. Mengingat lanskap negara dan bahkan dunia yang selalu berubah, gerakan feminis telah berkembang pesat dalam visi dan fokusnya dalam beberapa tahun terakhir. Feminisme mendapatkan kekuatan tidak hanya diseluruh dunia, tapi juga di negara kita. Di Indonesia kita sering mengasosiasikannya dengan sosok Raden Ajeng Kartini. Beliau sangat berpengaruh dalam melatih dan memberdayakan perempuan di Indonesia. Namun feminisme di Indonesia nampaknya mengambil jalan yang lebih sulit. Awal mula gerakan feminis di Indonesia adalah gerakan perempuan Indonesia melawan kolonialisme Belanda (Bentang Pustaka, 2021). Pada akhir abad ke-19, perempuan Indonesia ikut serta dalam perjuangan bersenjata melawan penjajah. Tokoh yang banyak berpengaruh dalam gerakan perjuangan ini antara lain Cat Mutia dan Amy Celan (Political Logic, 2017).

Setelah Indonesia merdeka dan memasuki era rezim lama, Presiden Sukarno mengajarkan perempuan tentang feminitas dan gulat serta memberi ruang bagi gerakan feminis di Indonesia. Saat ini ada “Gervani”, sebuah organisasi perempuan yang progresif. Di bawah Orde Baru, gerakan perempuan runtuh dan perempuan hanya digambarkan sebagai istri dan ibu bagi laki-laki. Gerakan feminis yang dimulai pada tahun 1960an berkembang dalam tiga tahap. Tahap pertama – 1975-1985. Pada tahap ini, hampir semua organisasi non-pemerintah menganggap isu gender tidak penting. Hal ini seringkali menimbulkan konflik antara aktivis perempuan dengan aktivis lainnya. Tahap selanjutnya adalah 1985-1995. Fase ini diawali dengan pengenalan analisis gender dan fase pemahaman dasar untuk memahami mengapa gender menjadi isu pembangunan. Pendidikan seks kini semakin banyak dilakukan. Tahap terakhir berlangsung sejak tahun 1995 hingga saat ini dan melibatkan penyertaan isu gender dalam seluruh kebijakan dan program berbagai organisasi dan lembaga pendidikan (Nalar Palkiya, 2017). Saat ini perjuangan feminisme di Indonesia terus berlanjut. Isu-isu seperti ketidaksetaraan upah, pelecehan seksual, reproduksi, hak-hak tubuh dan banyak lagi dibahas. Yang terbaru adalah perjuangan dan kemenangan disahkannya RUU TPKS tentang Perlindungan Korban Kekerasan Seksual. Namun, terlepas dari niat dan visi gerakan feminis yang baik, masih banyak kelompok yang menentang keras gerakan tersebut. Penolakan ini datang dari kelompok fundamentalis agama, konservatif, dan populisme sayap kanan. Alasan penolakan ini adalah karena feminisme sering dituduh sebagai ideologi Barat, gerakan anti laki-laki, dan bahkan gerakan “marah”(Iswara, 2021).

Feminisme global bermula dari Eropa, dimana antara tahun 1560 hingga 1648, gereja menyebarkan pandangan bahwa perempuan adalah asal dosa dan inferior. Mereka dianggap tak cerdas dan hanya pantas untuk tugas rumah. Pernikahan tak bisa bubar dan pendidikan perempuan dipersulit. Inspirasi untuk melampaui batasan ini mendorong perempuan (Political Reason, 2017). Gerakan feminisme global memiliki beberapa tahapan yang penting. Gelombang pertama

pada abad ke-19 dan awal abad ke-20 berfokus pada hukum, termasuk hak suara dan pendidikan perempuan, kondisi kerja, dan perlakuan ganda (Sapa Institute, 2020). Gelombang kedua terdiri dari aliran liberal, radikal, Marxisme, dan sosialis, yang masing-masing mengaitkan penindasan perempuan dengan aspek yang berbeda (PMII Gusdur, 2013). Gelombang ketiga mengglobal dan melibatkan aktivis dan akademisi. Postfeminisme lebih menekankan pada individualisme dan konsumerisme..

2.5.1 Feminisme Sebagai Diskursus dalam Melawan Kekerasan Kultural

Pandangan Johann Galtung tentang kekerasan memiliki banyak kesamaan dengan pandangan feminis radikal. Galtung mengidentifikasi patriarki sebagai bentuk kekerasan struktural dan budaya yang langsung. Patriarki menyebabkan pemisahan peran antara ranah publik dan pribadi, peran dalam produksi dan reproduksi, serta membentuk hubungan kekuasaan yang tidak seimbang antara laki-laki dan perempuan. Perempuan menjadi objek penindasan oleh laki-laki. Isu-isu seperti hak fisik dan reproduksi, seksualitas, gender, relasi kekuasaan antara laki-laki dan perempuan, serta konflik pribadi dan sosial menjadi fokus utama (Galtung, 1996:42). Galtung menyajikan solusi untuk mengatasi kekerasan berbasis gender sebagai berikut:

1. Meningkatkan empati laki-laki dengan teknik sosialisasi yang mirip dengan sosialisasi perempuan. Dalam hal mengurangi kekerasan, kesetaraan gender dicapai bukan dengan membesarkan anak perempuan sebagai anak laki-laki atau keduanya, namun dengan membesarkan anak laki-laki sebagai anak perempuan dan ayah sebagai ibu. Secara fisik, psikofisika sangat penting. (Galtung, 2010:46).

2. Ketika perempuan menyadari kewajibannya untuk memanusiaikan laki-laki, hubungan ibu-anak semakin meluas. (Galtung, 2010:46).

Tidak hanya mendukung feminis liberal, Galtung juga mendorong partisipasi perempuan dalam ranah publik. Namun, terdapat perbedaan antara pandangan ini: di satu sisi, feminis liberal percaya bahwa keterlibatan di ruang publik adalah hak, dan karena perempuan memiliki potensi yang setara dengan laki-laki, Galtung melihat perbedaan antara jenis kelamin sebagai faktor yang mengarahkan peran publik perempuan menuju hal yang sama seperti peran laki-laki (Galtung, 2004:67).

Meskipun bahasa menjadi penyebab penindasan terhadap perempuan karena bertentangan dengan feminis postmodern yang mengatakan bahwa rasisme linguistik adalah pengagungan terhadap laki-laki dan pengucilan, penghinaan atau upaya untuk mempermalukan perempuan, Galtung juga mengatakan bahwa bahasa adalah salah satu unsur kekerasan budaya. dimana perempuan sebenarnya muncul dari kekerasan budaya, khususnya kekerasan linguistik (Galtung, 1996: 204-205).

Dalam pembahasan tentang feminisme Marxis-sosialis, Galtung telah menyatakan bahwa feminisme memberikan kontribusi penting dalam usaha mengurangi kekerasan. Gerakan feminis membantu mengungkapkan keberadaan patriarki, sebagaimana fokus Marxis pada struktur yang mengikat alat dan metode produksi (Galtung, 2010:10).

Pengembangan konsep gender dalam masyarakat menciptakan perbedaan peran berdasarkan norma dan perilaku sosial yang terikat pada nilai-nilai budaya yang berlaku. Peran gender mencerminkan norma-norma yang mengharuskan laki-laki dan perempuan untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu dalam interaksi sosial (Agustina, 2015:4). Peran gender ini mempengaruhi pembagian kerja, hubungan kekuasaan, akses terhadap sumber daya, penerima manfaat, akses terhadap informasi dan pengambilan keputusan antara laki-laki dan perempuan. Peran gender yang terbentuk dalam masyarakat sedemikian rupa sehingga perempuan bertanggung jawab mengasuh anak, melakukan pekerjaan rumah tangga dan mengasuh suami, dan

peran laki-laki adalah menafkahi keluarga. Dalam struktur sosial budaya masyarakat, sering dianggap “kodrat perempuan” untuk membesarkan anak, menjaga dan menjaga kebersihan, serta mendekorasi rumah atau mengerjakan pekerjaan rumah. Dengan kata lain perempuan berperan dalam reproduksi, produksi dan pengaturan kehidupan sosial. Ada persepsi bahwa perempuan berpendidikan, pekerja keras, dan tidak mampu menjadi kepala keluarga, sehingga perempuanlah yang mengerjakan seluruh pekerjaan rumah. Hal ini mengacu pada sistem sosial dimana peran ayah adalah mengontrol (mengawasi) seluruh anggota keluarga, harta bendanya sendiri, sumber pendapatan dan merupakan pengambil keputusan utama. Yang disebut “sifat kewanitaan” atau “takdir Tuhan bagi perempuan” dalam mendidik anak dan menjaga kebersihan rumah sebenarnya bersifat gender (Fakih, 2008: 9-12).

Menurut konsep kekerasan struktural dan kekerasan budaya yang diungkapkan oleh Johan Galtung, patriarki dapat diidentifikasi sebagai akar dari fenomena kekerasan. Patriarki mengukuhkan posisi superior laki-laki berdasarkan maskulinitasnya, sementara perempuan ditempatkan dalam posisi subordinat karena feminitasnya (Galtung, 1996:40). Inti dari kekerasan struktural adalah eksploitasi. Struktur patriarki secara nyata memberikan keuntungan kepada laki-laki sebagai yang dominan, dengan penjelasan bahwa penetrasi, segmentasi, marginalisasi, dan fragmentasi terjadi dalam konteks gender, di mana angka harapan hidup perempuan sering kali lebih tinggi daripada laki-laki. Potensi ini dapat tercapai jika perempuan dapat menghindari praktik aborsi, pembunuhan bayi perempuan, dan kematian bayi (Galtung, 1996:199). Sebagai bentuk kekerasan budaya, patriarki membentuk pandangan dan keyakinan dominan yang ditanamkan sejak awal kehidupan, mengakar dalam kebutuhan akan kekuasaan dan kekerasan dalam kehidupan sehari-hari (Galtung, 2000:41).

Kekerasan budaya ini menjadikan kekerasan langsung dan sistematis tampak benar, atau setidaknya tidak salah. Salah satu mekanisme psikologis yang mungkin terjadi adalah internalisasi. Salah satu cara kerja kekerasan budaya adalah dengan mengubah warna moral suatu tindakan dari merah/salah menjadi hijau/kanan atau

setidaknya kuning/baik, seperti membunuh orang atas nama negara. nama orang. . Cara lainnya adalah dengan mengaburkan realitas sehingga kita tidak melihat tindakan atau fakta kekerasan, atau setidaknya tidak menganggapnya sebagai kekerasan (Galtung, 1996:198).

Dengan konsep feminisme dan konsep kekerasan Johan Galtung, penulis memetakan bentuk kekerasan kultural pada wanita diantaranya :

a. Beban ganda perempuan

Pemisahan antara ranah publik dan pribadi, di mana perempuan ditempatkan dalam lingkungan pribadi sementara laki-laki berada di ranah publik, berkaitan dengan pandangan biologis tentang peran gender. Peran yang diemban oleh perempuan di dalam rumah tangga mengakibatkan mereka memiliki pemahaman yang holistik terhadap berbagai hal, dan mereka memiliki pemahaman yang kompleks terhadap realitas yang ada. Mereka lebih peka terhadap lingkungan sekitar dan tidak hanya terfokus pada satu aspek saja. Ini menjadikan perempuan lebih terhubung dengan unsur alam, aspek biologis, dan keseimbangan, sehingga membuatnya cenderung lebih peduli, memiliki sifat feminin, dan kurang tertarik pada persaingan (Galtung, 1986). Namun, dalam praktiknya, perempuan juga harus mengemban peran di ranah publik, termasuk peran dalam masyarakat, dan dalam beberapa kasus, ada perempuan yang juga harus mencari penghidupan untuk keluarga mereka.

b. Marginalisasi perempuan

Perempuan memiliki akses terbatas ke sumber daya ekonomi seperti modal, pasar, kredit, dan pelatihan keterampilan hidup. Ini mengakibatkan kemiskinan dan eksploitasi perempuan yang meningkat seiring dengan globalisasi.

c. Subordinasi perempuan

Perempuan mengalami subordinasi dalam berbagai aspek kehidupan, baik dalam lingkungan keluarga, masyarakat, maupun sebagai warga negara. Dampaknya adalah perempuan seringkali tidak memiliki otonomi dalam membuat keputusan, termasuk yang berhubungan dengan diri mereka sendiri. Situasi ini diperparah oleh kebijakan negara yang cenderung memandang perempuan sebagai objek, dengan keterlibatan yang minim dalam proses perumusan kebijakan, dan terkadang bahkan tanpa keterlibatan sama sekali.

d. Stereotype terhadap perempuan

Johan Galtung mengamati bahwa dalam budaya yang dipengaruhi oleh keyakinan tertentu, perempuan seringkali mendapatkan posisi yang tidak menguntungkan. Pandangan agama seringkali menempatkan perempuan dalam nilai negatif (Galtung, 1996: 202). Situasi ini semakin diperburuk oleh penggunaan bahasa, yang juga dapat digunakan secara efektif untuk mengabaikan peran perempuan (Galtung, 1996: 205). Ironisnya, ilmu pengetahuan, yang seharusnya dapat mengakui kesetaraan semua individu, terkadang malah dimanfaatkan untuk mengeksploitasi perempuan lebih lanjut.